

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jepang menyerah tanpa syarat kepada Amerika Serikat dengan di tandatanganinya *The Postdam Declaration* pada tanggal 15 Agustus 1945. Sejak saat itu, masyarakat Jepang harus menerima kenyataan bahwa Amerika Serikat mengendalikan semua urusan negaranya. Segala sesuatu kebijakan harus tunduk kepada *Supreme Commander of Alliance Power (SCAP)*, perwakilan sekutu bagi pendudukan Jepang. Hal ini berlaku hingga akhir masa pendudukan tahun 1952, setelah disepakatinya "Perjanjian Perdamaian" antara Amerika Serikat dengan penduduk Jepang beserta 48 negara lainnya yang ditandatangani di San Francisco tanggal 8 September 1951 yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan penyerahan kekuasaan dan kedaulatan pihak Jepang pada tanggal 28 April 1952.¹

Setelah memperoleh kembali kedaulatannya, Jepang masih tetap mendapatkan berbagai upaya pembatasan pembatasan dari pihak AS, khususnya dalam bidang militer dan masalah pertahanan keamanan. Batasan-batasan itu terlihat pada kesepakatan bilateral antara AS-Jepang yang tercantum dalam perjanjian perdamaian, dan juga dalam *US-Japan Security Pact* yang ditandatangani tahun 1951 di San Francisco. Bila diteliti, sebenarnya upaya pembatasan Jepang dalam bidang militer

telah dimulai sejak perubahan konstitusi Jepang. Dengan kekalahan Jepang pada perang dunia ke II, Konstitusi Meiji yang sudah berlaku sejak 29 november 1890 digantikan kedudukannya oleh konstitusi Jepang 1947. konstitusi ini sangat dipengaruhi oleh cara pandang politik AS yang disesuaikan dengan kondisi politik saat itu yang ditujukan untuk menghambat bangkitnya militerisme Jepang.

Konstitusi Jepang yang disahkan oleh Parlemen Jepang pada 3 november 1947 dan mulai diberlakukan pada tanggal 3 mei 1947. Jepang menyatakan kesungguhannya mendukung perdamaian dunia dan menegaskan hal tersebut secara khusus pada pasal 9 yang berisi, selamanya meninggalkan penyelesaian konflik internasional dengan cara cara kekuatan militer, sehingga tidak diperlukan pemeliharaan potensi perang. Jepang adalah Negara damai, tanpa kekuatan militer.

Adapun isi pasal 9 tersebut adalah sebagai berikut :

" Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as a sovereign right of nation and the threat of use of force as a means of settling international disputes.

In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, sea and air force, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized".²

Konstitusi Jepang secara langsung maupun tidak langsung telah mengantarkan Jepang menjadi Negara yang lebih mengedepankan penyebaran nilai nilai kebudayaan negaranya melalui media masa maupun elektronik ,dan penggunaan diplomasi atau yang yang kita kenal dengan istilah *Soft Power*. Hal tersebut

disebabkan karena, Jepang sebagai pihak yang kalah dalam perang dunia ke II dipaksa menerima sanksi antara lain dilarang melakukan pembangunan militer yang bertujuan ofensif. Menurut Charles W. Kegley, Jr. Dan Eugene R. Wittkopf, *Soft Power* adalah kemampuan untuk meraih hasil yang diharapkan dengan lebih mengutamakan *attraction* daripada tekanan, karena pihak lain mengharapkan apa yang kita harapkan.³ Dengan demikian, yang diperlukan adalah membuat pihak lain merasa perlu ikut meraih tujuan yang sama dengan yang kita tawarkan. Pendapat lain mengatakan bahwa *Soft Power* ialah kemampuan untuk mempengaruhi aktor lain untuk melakukan sesuatu melalui pengaruh (Ideologi, Kebudayaan Dan Prestise).⁴

Penggunaan *Soft Power* dalam politik luar negeri Jepang salah satunya dengan melakukan penyebaran budaya Jepang terhadap Negara lain antara lain: diplomasi kebudayaan melalui pemanfaatan pendidikan, penyebaran kebudayaan Jepang melalui media cetak atau elektronik dalam bentuk buku komik (*Komikkusu*), kartun, karikatur, dan animasi (*Anime*). Do-ra-e-mon serta tokoh *Manga* yang paling populer pasca-Perang Dunia, kemudian Doraemon yang diciptakan oleh Hiroshi Fujimoto dan Motoo Abiko, yang kemudian dikenal sebagai Fujio Fujiko. Doraemon menjadi tokoh komik anak-anak pada 1970, dan ditayangkan dalam bentuk animasi di televisi pada 1978 dan acara tersebut tersebar di berbagai Negara di dunia.⁵ Unsur kebudayaan lainnya yakni penyebaran bahasa Jepang ke berbagai Negara di dunia, hal hal tersebut

³ Charles W. Kegley, Jr. Dan Eugene R. Wittkopf. " *The Global Agenda : Issues And Perspectives*" Sixth Edition, International Edition, Singapore, 2001, hal.30

⁴ Joseph S. Nye, Jr., " *Soft Power* " *Foreign Policy*, Fall 1990. hal.153

⁵ Kompas, Tanggal 2 Juni 2000

di atas merupakan sarana positif bagi Jepang untuk menyebarkan pengaruhnya terhadap Negara lain. Selain itu, pemberian bantuan kepada Negara Negara lain melalui ODA merupakan strategi Jepang untuk dapat menarik perhatian negara lain demi memperoleh kepentingan nasionalnya.

Pada permulaan berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1989 intensitas penggunaan *Soft Power* maupun *Hard Power* mengalami porsi yang sama dalam pelaksanaan politik luar negerinya. *Soft Power* Jepang dalam pemberian bantuan ODA Jepang, konsentrasinya terhadap modernisasi ekonomi, serta kerjasama diplomasi kebudayaan dengan Negara lain telah memberikan dampak yang baik terhadap kemajuan ekonomi Jepang serta persepsi yang baik dari masyarakat internasional terhadap Jepang. Kerjasama pertahanan Jepang dengan AS sebagai implementasi dari penggunaan *Hard Power*, banyak memberikan manfaat bagi pertahanan dan keamanan dalam negeri Jepang dalam mengantisipasi berbagai ancaman dari luar. Hingga saat itu penggunaan instrumen *Hard Power* dalam politik luar negeri Jepang hanya sebatas dalam kerjasama pertahanan dengan AS. Akan tetapi, dimulai pada tahun 1996, intensitas penggunaan *Hard Power* mengalami peningkatan diantaranya : pemberian sanksi ekonomi kepada Cina dan Korea Utara serta pembentukan aliansi pertahanan dengan Australia. *Hard Power* adalah kemampuan menjadikan pihak lain melakukan apa yang sebenarnya tidak ingin ia lakukan dengan menggunakan ancaman militer dan sanksi ekonomi.⁶ Pendapat lain mengatakan bahwa *Hard Power* bisa dilakukan melalui kekuatan militer yang terdiri

dari *Coercive Diplomacy*, perang dan aliansi.⁷ Dalam hal ini, sanksi ekonomi dan aliansi pertahanan menjadi acuan dalam politik luar negeri Jepang sebagai *Hard Power*.

Pemerintah Jepang melakukan sanksi ekonomi terhadap Negara Negara yang dianggap bertentangan dengan kepentingan nasionalnya. Pada tahun 1996 Jepang memberikan sanksi ekonomi kepada Cina atas percobaan tes nuklirnya, kemudian dua tahun setelahnya Ketika Korea Utara melancarkan program missilnya pada tahun 1998, pemerintah Jepang secara keras menjatuhkan sanksi ekonomi untuk menentang program Negara tersebut.⁸ bagaimanapun, ketika Korea Utara meluncurkan missile (rudal) nya lagi pada bulan juli 2006, pemerintah Jepang sudah memulai untuk menjatuhkan secara kuat sanksi ekonomi karena Foreign Exchange and Foreign Trade Control Law (FEFTCL) dan the Law For Special Measures Concerning Interdiction of Ports Entry by Specific Ships (LSMCIPESS) sudah direvisi atau dibentuk pada awal tahun 2004. FEFTCL dan LSMCIPESS merupakan 2 pilar utama dari aturan sanksi ekonomi di Jepang. keduanya membolehkan Jepang untuk menjatuhkan sanksi ekonomi menentang negara lain secara independen, tanpa membutuhkan resolusi sanksi dari PBB atau kerjasama dengan negara lain.⁹

Segera setelah peluncuran tujuh proyektil missile oleh Democratic People's

⁷ http://en.wikipedia.org/wiki/Hard_power, diakses tanggal 23 maret 2007

⁸ *Economic Sanctions By Japan Against North Korea*, International Journal Of Korean Unification Studies. Hal.1

⁹ Lihat penelitian Makio Miyagawa yang telah dilakukan di Jepang tentang efek-efek dan tujuan dari sanksi ekonomi., *Do Economic Sanctions Work?* (Great Britain:Antony Rowe Ltd, Chippenham, Wiltshire, 1992) dan Yasunobu Okabe, "The Effectiveness of Economic Sanctions: The US Embargo

Republic of Korea (DPRK) pada tanggal 5 Juli 2006. Pemerintah Jepang memutuskan untuk memaksakan sanksi ekonomi yang akhirnya, *pertama*, melarang masuk pelabuhan kepada pelayaran Man Gyong Bong 92 Korea Utara, karena pelayaran ini merupakan jalur penting yang menghubungkan antara kedua negara tersebut yang menghubungkan Wonsan di Korea Utara Dan Niigata di Jepang. *Kedua*, penghentian untuk kunjungan dari Man Gyong Bong 92 ke Jepang sebagaimana penolakan masuk terhadap pemerintah resmi Korea Utara, juga menolak izin pendaratan untuk berbagai maskapai penerbangan dari Korea Utara.¹⁰ Bahkan, Jepang memutuskan untuk memperpanjang sanksi ekonomi selama 6 bulan yang dijatuhkan kepada Korea Utara setelah percobaan nuklir pertamanya akhir oktober 2006.¹¹ hal ini sangatlah penting untuk menjadi catatan bahwa Jepang merupakan negara pertama yang mengeluarkan sanksi ekonomi terhadap Korea Utara.

Pembentukan pakta pertahanan yang sudah lama terjalin antara Jepang – AS, telah memberikan kontribusi yang penting terhadap pertahanan keamanan di Jepang mengingat bahwa Jepang sudah terikat oleh konstitusi 1947. Pakta pertahanan tersebut memberikan keuntungan bagi kedua Negara tersebut, AS dapat melancarkan kepentingan nasionalnya dengan mudah di kawasan Asia Timur begitupun juga Jepang mendapatkan dukungan pertahanan dari AS sehingga Jepang dapat lebih leluasa untuk mengambil kebijakan kebijakannya terhadap Negara lain tanpa kekhawatiran akan kekuatan pertahanan militernya. Pada bulan april 1996, presiden

¹⁰ *Ibid.*, hal.2

¹¹ *Japan: Strategic & Foreign Policies Impact Of North Korea Nuclear Tests,*

Bill Clinton dan PM Ryutaro Hashimoto, mereka menyepakati deklarasi bersama AS-Jepang mengenai keamanan, yang menyatakan kembali kelanjutan pakta pertahanan dan pertumbuhan pentingnya aliansi kedua Negara pada keamanan bangsa dan pada stabilitas daerah Asia Pasifik, hal tersebut dilakukan untuk membentuk suatu visi pemeliharaan dan memperkuat kemitraan bilateral, bagi Jepang sendiri pakta pertahanan tersebut membuat Jepang lebih kuat dalam pertahanan militernya demi menjaga dan memelihara perdamaian dan kemakmuran ekonomi. Selain aliansi pertahanan dengan AS, Jepang juga membentuk aliansi pertahanan baru dengan Australia.¹² Strategi kerjasama pertahanan Jepang dan Australia membuat stabilitas dan kekuatan kedua negara tersebut menjadi lebih efektif untuk melawan ancaman dari musuh, bagi Jepang sendiri pakta pertahanan tersebut membuat Jepang lebih kuat dalam pertahanan militernya demi menjaga dan memelihara perdamaian dan kemakmuran ekonomi.

Disamping pemberian sanksi ekonomi terhadap Negara Negara yang dianggap membahayakannya, pembentukan pakta pertahanan dengan Negara lain, Jepang juga memanfaatkan kekuatan militernya untuk menjaga kedaulatan negaranya serta kepentingan nasionalnya dengan menggunakan ancaman militer sebagai sarana ampuh untuk mendapatkan kepentingan negaranya. Hal tersebut tampak ketika Negara Cina memodernisasi kekuatan militernya, Jepang merasa khawatir akan stabilitas keamanan dikawasannya kemudian Jepang mengambil langkah langkah

¹² "Japan-Australia Defence Agreement: Perspectives",

yang konstruktif yakni dengan meningkatkan kemampuan angkatan bersenjataanya.

Militer Jepang memiliki anggaran fiscal tahunan mulai 1 april 2004 sampai maret 2005 sebesar 4,9 triliun yen(46,7 miliar dollar AS), ketiga terbesar di dunia,¹³ naik 0,7% dari anggaran belanja tahunan fiscal 2003, jumlah ini setara dengan US\$ 45.324 milyar. Keadaan ini tidak mengalami perubahan berarti jika memperhatikan permintaan agen pertahanan atas anggaran belanja pertahanan untuk tahun fiscal 2005 yang diajukan bulan September 2004 sebesar 4.933 triliyun, dengan kenaikan sebesar 1,2% dari anggaran pertahanan 2004. tampak ada pergeseran dalam prioritas pertahanan, dimana agen meminta anggaran untuk tank, peralatan berat perang lainnya dan artileri. Agen pertahanan juga meminta 144.2 milyar yen untuk pertahanan rudal.¹⁴

Untuk kemampuan personil dan persenjataan, Jepang memiliki sekitar 240.000 personil dan anggaran pertahanan sekitar US\$ 50 milyar yang tergolong paling tinggi di dunia, akan tetapi kekuatan pertahanan Jepang ini murni bersifat defensive semata sebagaimana yang telah diatur dalam konstitusi.¹⁵ Jumlah personil ini tersebar kedalam tiga cabang kekuatan, Kekuatan Bela Diri Darat, Laut Dan Udara. Khusus untuk pertahanan rudal, Jepang secara formal telah memulai kerjasama sistem pertahanan rudal dengan AS pada bulan Desember 1998, ketika

...tentang... ini... sistem... *New Theater Wide Defense*

(NTWD).¹⁶ Presiden AS saat itu, Bill Clinton merupakan pemrakarsa sistem ini, yang kemudian NTWD dibagi dalam dua wilayah administrasi, *National Missile Defense* (NMD) untuk melindungi wilayah Amerika dan *Theater Missile Defense* (TMD) untuk memproteksi kekuatan Amerika yang menyebar di luar negeri dan negara-negara sekutu AS. Untuk kepentingan ini Jepang telah membelanjakan hamper 15,6 milyar yen sampai pada tahun fiscal 2003, dengan rincian pada fiscal 1999 sebesar 960 juta yen, 2.1 milyar yen fiscal tahun 2000, dan 1.9 milyar yen di tahun 2003.¹⁷

Berdasarkan fakta fakta dari perubahan politik luar negeri Jepang yang telah dipaparkan diatas, tindakan yang diambil oleh Jepang tersebut menunjukkan bahwa pasca Perang Dingin penggunaan *Hard Power* dalam politik luar negeri Jepang mengalami peningkatan.

B. Rumusan masalah

Melihat dari latar belakang di atas maka peneliti mengajukan pokok permasalahan sebagai berikut :

Faktor-faktor apa yang meningkatkan intensitas penggunaan Hard Power dalam Politik Luar Negeri Jepang ?

¹⁶ NTWD adalah sebuah sistem untuk menangkal rudal balistik selama dalam perjalanan dengan

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memberikan deskripsi mengenai penggunaan *Soft Power* menjadi *Hard Power* dalam politik luar negeri Jepang serta menjadikannya sebagai suatu wacana dalam khasanah hubungan internasional.
2. Ditujukan untuk memenuhi persyaratan akademis yang dibebankan kepada penulis pada jenjang studi strata 1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Jurusan Hubungan Internasional sekaligus sebagai bentuk penerapan teori teori yang pernah diterima penulis pada masa perkuliahan masih aktif

D. Kerangka Pemikiran

1. Teori Pengambilan Keputusan (Decision Making Theory).

Dalam melakukan atau mengambil kebijakan politik luar negeri, suatu negara akan di pengaruhi oleh beberapa variabel. Menurut William D. Coplin, bahwa pengambilan keputusan dalam kebijakan politik luar negeri dipengaruhi oleh 3 variabel yaitu:

a. Kondisi politik dalam negeri(*Domestic politics*).

yang meliputi keadaan atau situasi di dalam negara yang akan membuat keputusan, yaitu situasi politik di negara iu yang berkaitan dengan keputusan

yang meliputi keadaan atau situasi di dalam negara yang akan membuat keputusan, yaitu situasi politik di negara iu yang berkaitan dengan keputusan

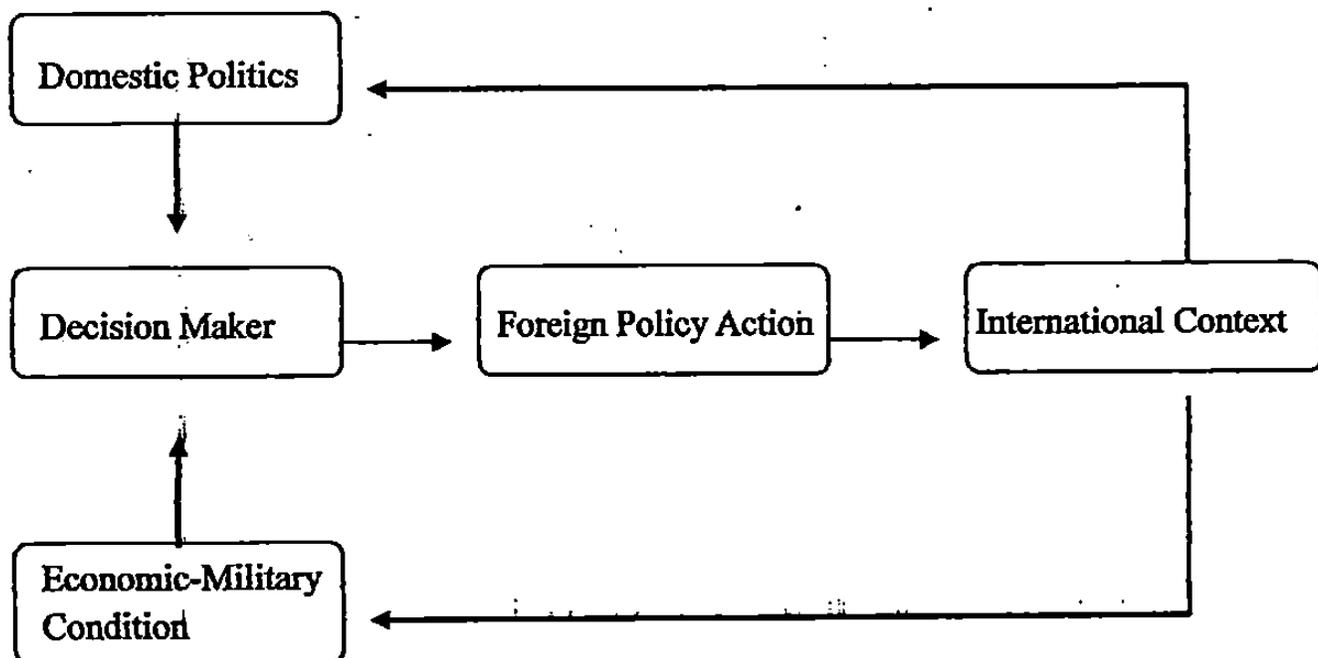
b. Kemampuan ekonomi dan militer (*Economic-Military Capability*).

yaitu situasi ekonomi dan militer di negara tersebut, termasuk faktor geografis yang selalu menjadi pertimbangan utama dalam pertahanan keamanan

c. Konteks internasional (*International Context*).

Kondisi-kondisi internasional pada saat itu termasuk negara yang berbatasan dengan satu negara akan mendorong tindakan-tindakan luar negeri tersebut.

Skema 1
Pengambilan Kebijakan Politik Luar Negeri
William D Coplin



Sumber : William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional : Suatu telaah teoritis*, Sinar Baru, Bandung, 1992,hal.30

Ilustrasi skema tersebut di atas menjelaskan interaksi variabel sehingga

dalam dua faktor yaitu internal dan eksternal. teori tersebut akan digunakan untuk menjelaskan faktor faktor apa yang meningkatkan intensitas penggunaan *Hard Power* dalam politik luar negeri.

1. Politik dalam negeri Jepang

Keputusan yang diambil oleh setiap negara dalam merumuskan kepentingan nasionalnya terhadap negara lain senantiasa akan dipengaruhi oleh situasi maupun keadaan yang ada di dalam negeri negara tersebut. Situasi politik dalam negeri Jepang pasca Perang Dingin selalu diwarnai oleh berbagai macam masalah, mengingat bahwa pasca Perang Dingin negara-negara yang berada di kawasan Asia Timur mengalami sebuah instabilitas keamanan yang ditandai dengan meningkatnya perlombaan persenjataan oleh negara-negara di Asia Timur.

Semenjak berakhirnya Perang Dingin Jepang dihadapkan pada dua masalah penting dalam bidang ekonomi maupun militer, dalam bidang ekonomi Jepang dihadapkan pada dua pilihan yakni memilih trilateralisme ialah mengharuskan Jepang hanya melakukan hubungan dagang dengan AS dan Eropa atau Multilateralisme ialah melakukan hubungan dagang tidak hanya dengan AS dan Eropa. Dalam bidang militer Jepang dihadapkan pada dua pilihan yakni tetap berpayung pada AS atau lepas dari AS. Namun akhirnya Jepang memutuskan untuk memilih multilateralisme karena pasar pasifik lebih terbuka dan di AS dan Eropa lebih berisiko, dan Jepang masih bisa berhubungan dengan AS namun dengan ikatan yang lebih longgar.

Namun di sisi lain Jepang yang telah tumbuh sejak dulu telah memberikan

kontribusi yang lebih terhadap pembuatan-pembuatan keputusan yang diambil oleh Jepang. Bangsa Jepang adalah sebuah bangsa yang homogen. Karena itu sebuah perasaan kebangsaan dapat dengan mudah tercipta. Nasionalisme sebenarnya bukan merupakan hal baru. Persoalan ini timbul tenggelam terbawa arus zaman yang terus berubah.

Sikap sebagian dari masyarakat Jepang untuk menentang keras terhadap kepemilikan senjata nuklir di seluruh dunia merupakan salah satu langkah efektif untuk mengurangi kepemilikan senjata nuklir di dunia dan mengurangi kemungkinan terjadinya perang nuklir. Menurut jajak pendapat yang diterbitkan Harian Yomiuri menyatakan bahwa sebagian masyarakat Jepang lebih senang jika negaranya tetap mempertahankan kebijakan antisenjata nuklir.¹⁸

Keinginan Jepang untuk mempertahankan prinsip anti nuklir merupakan salah satu dari negara-negara di dunia yang menghendaki akan terciptanya suatu peradaban yang aman dan damai. Masyarakat Jepang sebagai negara yang pernah menjadi korban dari senjata nuklir mempunyai tanggung jawab moral untuk menyebarluaskan ke seluruh dunia filosofi dari hibakusha/korban bom atom yang masih hidup dan fakta-fakta dari satu peristiwa pengeboman bom atom yang pernah dialami oleh Jepang pada Perang Dunia II. Selain itu, seruan masyarakat Jepang terhadap dunia internasional terhadap antinuklir terus diperjuangkan baik di luar negeri maupun di dalam negeri masyarakat Jepang mendesak pemerintahnya untuk

¹⁸ Rakyat Jepang Dukung Kebijakan Antinuklir

melakukan berbagai macam upaya demi mengatasi ancaman nuklir terhadap dunia.¹⁹ Berbagai upaya terus dilakukan untuk menghentikan pengembangan nuklir semakin meluas.

Kalangan politisi Jepang juga mendukung perjuangan untuk tetap berpegang pada prinsip anti-nuklir. Mantan PM Jepang Shinzo Abe ketika menghadiri peringatan 62 tahun peristiwa bom atom juga mengatakan akan menjunjung tinggi undang-undang yang secara jujur diaspirasikan dari keinginan untuk menjaga perdamaian dunia dan akan secara tegas menjunjung tiga prinsip antinuklir yaitu Jepang tidak akan memiliki, memproduksi dan tak akan pernah membiarkan adanya senjata nuklir berada di dalam sejangkal wilayahnya,²⁰ⁿ

Dewan perwakilan di Jepang mengungkapkan penyesalan dan secara mutlak mengadopsi suatu resolusi yang mengutuk uji nuklir yang dilakukan Cina dan menuntut Cina segera membatalkan semua rencana untuk mengadakan uji nuklir lebih lanjut.

Takemura Masayoshi, mantan pemimpin partai baru sakikage, komponen terkecil dari aliansi tripartit yang berkuasa di Jepang, mendesak Beijing untuk tidak melakukan uji nuklir lagi. Lebih lanjut ia menganjurkan agar pembicaraan-pembicaraan di masa mendatang tentang bantuan Yen resmi Jepang ditunda dan agar Jepang hati hati dalam menawarkan bantuan ekonomi kepada Cina. Pemerintah Jepang segera mengungkapkan protes keras terhadap uji nuklir Cina kepada

¹⁹ Hiroshima Peringati 62 Tahun Peristiwa Bom Atom

perwakilan Cina di Jepang, meskipun demikian Hashimoto Ryotaro yang kemudian menjadi perdana menteri Jepang mengulangi bahwa ia Cuma mempertimbangkan pembekuan pinjaman, dengan mengatakan bahwa itu akan meningkatkan luka-luka dalam hubungan-hubungan bilateral bila ia melakukannya.²¹

Murayama Tomiichi, mantan perdana menteri yang mengepalai Partai Sosialis Demokrat, setuju dengan mengatakan bahwa memang seharusnya Jepang terus menunda bantuan hibah kepada Beijing namun pembekuan bantuan pinjaman akan berpengaruh negatif terhadap usaha-usaha Cina untuk melangkah maju dengan kebijakannya menuju suatu ekonomi terbuka. Protes keras juga dilancarkan oleh Jepang ketika Korea Utara, Rudal yang pernah ditembakkan tahun 1998 itu terbang di atas Jepang menuju ke Lautan Pasifik. Peluncuran itu mengejutkan Jepang dan mendesak Pemerintah Jepang untuk segera meningkatkan kemampuan pengintaiannya terhadap Korea Utara. Jepang akan menuntut Korea Utara agar menghentikan penembakan rudalnya. Itu karena di tengah ketegangan nuklir sekarang ini, persiapan penembakan sebuah rudal dapat dianggap sebagai pertanda adanya gerakan militer. Menurut jajak pendapat surat kabar baru-baru ini menyatakan bahwa 80 persen penduduk Jepang merasa yakin Korea Utara merupakan ancaman.²²

Kondisi politik dalam negeri Jepang yang terjadi pada saat itu, respon-respon masyarakat Jepang terhadap situasi yang terjadi baik di dalam maupun di luar. Kalangan politisi, masyarakat sipil, yang mengutuk uji coba rudal maupun nuklir,

²¹ *Kompas*, 11 Februari 1998

²² Jepang Pantau Ketat Korea Utara, << [Http://Www.Kompas.Com/Kompas-](http://www.kompas.com/kompas-)

untuk mengambil tindakan preventif guna mencegah penggunaan dan pengembangan senjata nuklir di dalam negeri maupun di luar negeri, telah membuahahkan hasil yang akhirnya parlemen Jepang memutuskan untuk mengeluarkan sanksi ekonomi terhadap negara-negara yang telah melakukan uji coba nuklir maupun rudal di antaranya, Jepang memberikan sanksi ekonomi kepada Cina yakni dengan melakukan penurunan bantuan ODA Jepang, pencairan bantuan ODA Jepang kepada Cina menurun dari US\$ 1,48 milyar pada tahun 1994 menjadi US\$ 61,7 juta tahun 1996²³, ini tentu merupakan bukti tentang rasa tidak puas Jepang terhadap tindakan yang dilakukan oleh negara tersebut. Kemudian Jepang juga memberikan sanksi ekonomi kepada Korea Utara ketika negara tersebut melakukan uji coba rudal balistik Taepodong-1 pada tahun 1998.²⁴ Sanksi ekonomi tersebut diberikan selama enam bulan kepada Korea Utara dengan melarang masuk pelabuhan kepada pelayaran Man Gyong Bong 92 Korea Utara karena pelayaran ini merupakan jalur penting yang menghubungkan kedua negara tersebut serta menolak izin pendaratan untuk berbagai maskapai penerbangan dari Korea Utara.²⁵ Jepang memberikan sanksi ekonomi yang kedua kali kepada Korea Utara setelah negara tersebut melakukan uji coba nuklir dengan melakukan larangan bagi kapal berbandera Korea Utara memasuki wilayah Jepang, serta semua larangan impor barang dari Korea Utara.²⁶

Kondisi masyarakat dan respon dari para polisi Jepang, kelompok anti-

²³ Kompas, 12 Agustus 1998

²⁴ "Korea Utara tes mesin rudal jarak jauh"

²⁵ <<http://www.suaramerdeka.com/harian/0406/11/m12.htm>>

²⁶ <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=184080>, diakses tanggal 2 Juli 2007

nuklir, kemudian mempengaruhi kehidupan politik dalam negeri. hal tersebut memicu pemerintah untuk melakukan dan mengambil keputusan politik luar negeri terhadap Cina dan Korea Utara. Jepang sebagai negara yang pernah menjadi korban keganasan senjata nuklir harus bertindak lebih tegas dengan menghentikan segala aktifitas pengembangan senjata nuklir diantaranya dengan memberikan sanksi sanksi ekonomi kepada Cina dan Korea Utara

2. Kemampuan Ekonomi Dan Pertahanan Militer Jepang

Pengambilan keputusan politik luar negeri harus pula mempertimbangkan kekuatan ekonomi dan militernya. Jepang harus menyeimbangkan komitmen dan kemampuannya dengan memahami keterbatasannya, yang diakibatkan oleh kondisi-kondisi ekonomi dan militer. kekuatan militer sangat berkaitan dengan 3 variabel yaitu : jumlah tentara, kualitas perlengkapan dan tingkat keterlatihan.

Perbedaan yang sangat mencolok antara Jepang dan negara negara di Asia Timur dalam hal perlengkapan militer merupakan sebuah hal yang sangat berpengaruh ketika Jepang menyusun dan merealisasikan kebijakan kebijakannya untuk meningkatkan penggunaan *Hard Power* dalam politik luar negerinya. Jepang yakin dan percaya jumlah tentaranya, pada alat alat militernya hampir menandingi kemampuan militer negara lain, serta hubungan aliansi pertahanan yang sudah lama terjalin antara Jepang - AS, membuat Jepang merasa yakin akan keamanan negaranya, terlebih dengan kemampuan teknologi yang dimilikinya Jepang mampu memodernisasi kemampuan pertahanan militernya.

Sebagai negara yang memiliki *power* yang lebih dalam bidang ekonomi sejak

dahulu Jepang telah melakukan perdagangan dengan banyak negara, termasuk juga negara-negara ASEAN. Ekspor Jepang ke ASEAN diperkirakan naik US\$ 20 milyar, ekuivalen dengan 27,5 persen ekspor 1997.²⁷ Ketika terjadi perang Korea, Jepang mampu menggerakkan perekonomiannya dengan GNP perkapita 21 persen pada tahun 1955 meningkat menjadi 56 persen di tahun 1970. Pada tahun 1968 perekonomian Jepang telah menjadi kedua terbesar di dunia setelah AS.²⁸

Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi 2,5-3% pertahun dan dengan kemajuan ekonomi yang sedemikian tinggi, maka bukanlah hal sulit bagi Jepang dalam mengambil kebijakan luar negerinya. ODA sebagai bantuan pembangunan resmi sudah banyak negara-negara di dunia yang menjadi penerima ODA baik di Eropa maupun Asia. Kekuatan Jepang sebagai negara yang memberikan bantuan pembangunan resmi ODA kepada negara lain, membuat Jepang dapat memanfaatkan kebijakan ODA yang diambilnya. Ketika Cina melakukan uji coba nuklir, Jepang melakukan penundaan pemberian ODA kepada negara tersebut hingga negara tersebut menghentikan kegiatannya. Predikatnya sebagai raksasa ekonomi serta kebutuhan negara lain terhadap bantuan ODA Jepang dan backup pertahanan dari AS yang sudah lama terbentuk melalui *Japan-US Security Alliance* membuat Jepang merasa lebih leluasa dalam pembuatan keputusan luar negerinya.

²⁷ www.csis.org

3. Konteks Internasional

Berakhirnya Perang Dingin belum menjamin bagi terwujudnya keamanan dan perdamaian dunia. Konflik antar etnis/ras, terorisme, pencucian uang, penyelundupan manusia, perdagangan ilegal, narkoba adalah ancaman non tradisional dan merupakan ancaman terhadap keamanan domestik, regional dan global. Sedangkan ancaman tradisional seperti senjata pemusnah masal, sengketa antar Negara dan perlombaan senjata tetap merupakan isu laten.

Saat ini Uni Soviet tidak lagi menjadi aktor utama yang menentukan pola hubungan internasional di kawasan Asia Pasifik meskipun pengaruhnya tetap besar. Rusia dimasa mendatang lebih memfokuskan perhatiannya pada masalah rekonstruksi ekonomi dalam negerinya. Sementara itu, AS meskipun masih sebagai kekuatan Pasifik yang utama tetapi komitmen keamanannya mulai melemah akibat dari masalah-masalah ekonominya. Berkurangnya kekuatan AS di Asia Pasifik dan menciutnya anggaran militer, Rencana penarikan sejumlah 14000 pasukan AS dari berbagai pangkalan di kawasan pada April 1991; 5000 diantaranya dari Jepang, 7000 dari Korea Selatan dan 2000 dari Filipina dan rencana Uni Soviet untuk mengurangi jumlah pesawat angkut militernya di kawasan ini dikarenakan anggaran yang mengecil²⁹; menimbulkan spekulasi akan terjadinya kekosongan kekuatan di kawasan Asia Pasifik.

Jepang merupakan Negara yang berada di kawasan Asia Timur yang mana di kawasan ini terdapat Negara-Negara yang mempunyai kekuatan ekonomi maupun

militer yang sangat berpengaruh terhadap kondisi keamanan di wilayah tersebut. Cina dan Korea Utara merupakan Negara yang mempunyai andil besar terhadap stabilitas keamanan di Asia Timur. Pasca berakhirnya Perang Dingin Negara Negara di kawasan ini berlomba lomba untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan negaranya masing-masing untuk menghadapi ancaman dari dalam maupun dari luar negaranya. Cina sebagai salah satu Negara yang mempunyai populasi yang banyak di dunia, semakin giat untuk memodernisasi pertahanan dan keamanan Negeranya peningkatan militer tersebut didukung dengan persenjataan nuklir dan sempat melakukan uji nuklirnya, selain itu Korea Utara yang secara geografis berdekatan dengan Jepang semakin aktif untuk melakukan uji coba rudal nya dan nuklirnya yang bagi Jepang tindakan tersebut dapat mengancam keamanan wilayahnya. Karena situasi keamanan tersebut Jepang menganggap bahwa penggunaan *Hard Power* dalam politik luar negerinya sangatlah diperlukan yakni dengan cara memelihara dan mempertahankan sekaligus meningkatkan kerjasama pertahanan Jepang dengan AS, membuat pakta pertahanan baru dengan Australia guna mencegah ancaman yang dapat membahayakan negaranya serta memberikan sanksi ekonomi kepada kedua Negara tersebut untuk menentang program uji coba nuklir dan rudalnya.

2. Konsep Kepentingan Nasional

Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, kepentingan nasional adalah:

“ The fundamental and ultimate determinant that guides the decision makers of a state in making foreign policy. The national interest of a state is typically a highly

generalized conception of those element that constitute the state's most vital needs. They include self preservation, independence, territorial integrity, military security and economic well being ".³⁰

Kepentingan nasional dari suatu Negara dicirikan sebagai konsep umum dari elemen elemen yang disusun berdasarkan kebutuhan vital Negara. Meliputi mempertahankan diri sendiri, kemerdekaan, integritas wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi.

Sedangkan menurut Morgenthau, kepentingan nasional suatu Negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu Negara atas Negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini bisa diciptakan melalui teknik teknik paksaan maupun kerjasama.³¹

Walaupun konsep ini sering dipakai untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri serta mengukur keberhasilan politik luar negeri suatu Negara. Jadi pembahasan mengenai politik luar negeri senantiasa dimulai dari kepentingan nasional suatu Negara yang melaksanakannya. Pada dasarnya kebijakan luar negeri suatu Negara merupakan suatu rangkaian strategi kegiatan dari tindakan yang terencana dan dikembangkan oleh pembuat keputusan disuatu Negara terhadap Negara lain atau terhadap entitas internasional yang ditujukan untuk meraih tujuan spesifik yang terdefinisi demi kepentingan nasionalnya.

³⁰ Jack C. Plano. Roy Olton, *The International Relation Dictionary*, (New York : Holt Rinehart And Winston Inc, 1969) Hal.128

³¹

Berdasarkan penjelasan dari konsep politik luar negeri yang telah dijelaskan di atas, pada dasarnya, persoalan suatu negara untuk mengembangkan interaksi dengan dunia internasional, menjaga dan memelihara kedaulatan negara dari ancaman negara lain merupakan hak sebuah negara yang merdeka. Dalam konteks ini, peningkatan penggunaan *Hard Power* dalam politik luar negeri Jepang yang diaplikasikan dalam bentuk pemberian sanksi ekonomi kepada Korea Utara dan Cina serta pembentukan aliansi pertahanan dengan AS dan Australia, merupakan salah satu strategi Jepang untuk mendapatkan kepentingan nasionalnya yakni untuk meningkatkan *self-preservation* dalam menjaga kedaulatan negaranya dari ancaman-ancaman baik dari dalam maupun dari luar.

Perubahan dalam politik luar negeri suatu negara secara otomatis akan mempengaruhi negara lain, yang kemudian negara tersebut akan mendapatkan *feedback* dan pada akhirnya akan menjadi input dalam pembuatan kebijakan nasional berikutnya.

E. Hipotesa

Dari pemaparan di atas maka hipotesa yang dapat diajukan mengenai faktor-faktor yang meningkatkan intensitas penggunaan *Hard Power* dalam Politik Luar Negeri Jepang adalah :

- Keinginan masyarakat Jepang untuk meningkatkan *self preservation*
- Menyempurnakan kekuatan militer Amerika Serikat di kawasan Asia Timur pasca

perang dingin

- Aktifitas percobaan serta pengembangan nuklir maupun rudal oleh Cina dan Korea Utara

F. Jangkauan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memulai penulisan hanya pada rentang waktu pasca berakhirnya perang dingin, yakni antara tahun 1989 sampai tahun 2007. Tahun-tahun sebelum periode tersebut maupun sesudahnya tetap menjadi perhatian selama masih menyangkut kepentingan analisis dalam menyusun penelitian ini.

G. Metode Pengumpulan Dan Analisis Data

Dalam melakukan penelitian untuk penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data yang bersifat studi kepustakaan (*Library Research*). Untuk itu, penulis mengambil referensi berupa buku buku literature, bulletin bulletin, jurnal, kliping dari Koran dan majalah serta informasi informasi yang didapat dari website di internet dan referensi lain yang mendukung dalam fokus

H. Sistematika Penulisan

Bab I merupakan gambaran umum mengenai maksud, tujuan dan hasil yang hendak dicapai oleh penulisan skripsi. Dalam bab ini, memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Hipotesa, Metodologi Penelitian, Jangkauan Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

Bab II Dalam bab ini penulis akan memberikan penjelasan yang lebih luas mengenai kebijakan kebijakan luar negeri Jepang pasca Perang Dingin tahun 1989-2007, dan terakhir mengenai tantangan-tantangan Jepang di kawasan Asia.

Bab III Penjelasan dalam bab ini akan membahas instrumen-instrumen politik luar negeri Jepang, pembahasan asumsi dasar politik luar negeri Jepang serta instrumen-instrumen *Soft Power* dan *Hard Power* apa saja yang digunakan oleh Jepang dalam politik luar negerinya .

Bab IV Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan tentang beberapa faktor yang meningkatkan penggunaan *Hard Power* dalam politik luar negeri Jepang. Faktor faktor ini akan diklasifikasikan menjadi faktor internal dan faktor eksternal.

Bab V Merupakan kesimpulan dari masing masing bab dengan penjelasan yang lebih singkat dan ringkas